

ANALISIS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA

by Imroatus Sholikhah

Submission date: 11-Jul-2019 05:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 1150851390

File name: 11._Imroatus_Sholikhah_Wahyudin_-_document-8-dikonversi.docx (39.54K)

Word count: 3887

Character count: 24939

ANALISIS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2014
Disetujui Oktober 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:
Revenue; Revenue Sharing;
General Allocation Fund;
Wide of Region; and Capital
Expenditures.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang berjumlah 93 Kabupaten/Kota pada Tahun 2010. Alat analisis untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAU mempunyai arah negative dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Abstract

The aim of this research is for knowing there or not the impact of Revenue, Revenue sharing, General allocation Fund, and Wide of Region against Capital Expenditure Budget Allocation of the Government of Regency/City in Java Island either simultaneously or partial. The sample in this research is the Government of Regency/City in Java Island consists of 93 Regency/City in 2010. This Research uses secondary data in the form of budget realization report of the Government of Regency/City in Java Island in 2010. The hypotheses testing used Multiple linier regression analyze. The results of this research concluded that partial variables there are Revenue, Revenue Sharing and Wide of Region had significant effect on Capital Expenditure. While the General Allocation Fund had negative direction and not significant to Capital Expenditure. Simultaneously variables Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Fund, and Wide of Region significant effect on Capital Expenditure.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi salah satu babak baru bagi hubungan pusat dan daerah. Produk-produk hukum tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembaharuan dalam sistem pemerintahan. Pemerintahan yang awalnya berkiblat pada sentralisasi berubah menjadi sistem desentralisasi. Adanya otonomi daerah yang membawa sistem pemerintahan yang mangacu pada sistem desentralisasi maka terjadi pembaharuan dan evolusi dalam berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada Belanja Modal, karena Belanja Modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator bagi penilaian kinerja pemerintah dalam mengemban amanah dari rakyat.

DJPK (2013) menyatakan APBD yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya menunjukkan sumber-sumber pendapatan daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Pada tahun 2010 APBD lebih banyak didominasi belanja aparatur. Di tingkat provinsi, rata-rata 41% belanja daerah dipakai untuk menggaji pegawai dan pejabat daerah. Begitu pula di kabupaten/kota, persentasenya cukup tinggi, yakni sekitar 42%. Komposisi belanja pemerintah yang masih didominasi oleh belanja

aparatur belum menunjukkan anggaran yang memihak rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs DJKD (November 2013), prosentase belanja pegawai pada tahun 2010 hanya mencapai angka 45% dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 58%. Melihat data tersebut maka dapat disimpulkan, belanja pegawai dari tahun ke tahun terus meningkat dan mendominasi komposisi APBD.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007), Askam Tuasikal (2008), Kusnandar dan Dodik (2009) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007) dan Askam (2008) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) DAU berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal namun dengan arah yang negatif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009), DAU tidak berpengaruh secara statistik terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009) menunjukkan bahwa Luas Wilayah Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap alokasi Belanja Modal.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran Belanja Modal dengan mengambil variabel PAD, DBH, DAU dan Luas Wilayah Daerah sebagai variabel independen.

Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Ketika keputusan pengalokasian dibuat, motivasi terhadap preferensi pengeluaran terkait dengan *moral hazard* legislatif. Preferensi legislatif adalah pada proyek infrastruktur karena lebih mudah digunakan sebagai bentuk pemenuhan atas janji kepada *voters*-nya (Keefer & Khemani, 2003 dalam Abdullah dan Jhon, 2006). Preferensi legislatif mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan *rente* lebih besar. Artinya, kecenderungan legislatif untuk lebih *prefer* pada alokasi Belanja Modal merupakan realisasi dari *self-interest* mereka (Abdullah dan Jhon, 2006).

Uraian diatas memberikan suatu tanda bahwa, antara legislatif dan eksekutif mempunyai preferensi yang berbeda dalam masalah penganggaran. Sebagai pihak yang mempunyai tanggungjawab membuat dan mengelola anggaran, eksekutif akan sering mendapatkan tekanan ketika mengalokasikan anggaran. Dalam hal ini legislatif akan terus berusaha memaksimalkan keuntungan bagi kelompok mereka maupun bagi pribadi mereka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007) menunjukkan bahwa PAD mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini menunjukkan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Setiap penyusunan APBD, alokasi Belanja Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan daerah yang sangat penting untuk membantu laju pembangunan di daerah. Adanya Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja di daerah. Pendapatan Asli Daerah ini juga menjadi tolok ukur dari keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah mandiri yang sesuai dengan konsep desentralisasi. Hubungan antara PAD terhadap Belanja Modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

Ha : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa.

Pengaruh DBH terhadap Alokasi Belanja Modal

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah Daerah akan mampu menetapkan Belanja Modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil Belanja Modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil (Wandira, 2013).

DBH ini merupakan komponen dari dana perimbangan yang menjadi salah satu faktor pendukung dari Belanja Modal. Adanya DBH ini biaya pembangunan di daerah dapat bertambah. DBH berasal dari pajak dan kekayaan sumber daya alam daerah, pengelolaan sumber-sumber penerimaan dari DBH sering menimbulkan konflik. Konflik tersebut terjadi karena ada hubungan keagenan antara Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mendapatkan timbal balik dari apa yang telah mereka bayarkan kepada Pemerintah. Akan tetapi diantara keduanya seringkali terjadi perbedaan preferensi.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2010) menunjukkan bahwa DBH baik itu DBH Pajak maupun DBH Sumber Daya Alam mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sehingga dapat disimpulkan bahwa DBH mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pengalokasian Belanja Modal, karena dengan adanya transfer DBH dari pemerintah alokasi Belanja Modal dapat ditingkatkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan hasil penelitian diatas adalah besaran DBH mempengaruhi alokasi Belanja Modal yang akan digunakan untuk pembangunan di Daerah, semakin banyak DBH

yang dihasilkan oleh suatu daerah maka transfer dari Pemerintah Pusat pun akan lebih tinggi.

Hubungan antara DBH terhadap Belanja Modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

Ha₂ : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa.

Pengaruh DAU terhadap Alokasi Belanja Modal

DAU menjadi salah satu dana perimbangan yang juga mempunyai sumbangsih yang cukup besar dalam mendukung pembangunan daerah. Darwanto dan Yulia (2007) menjelaskan berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007) menunjukkan bahwa, DAU mempunyai korelasi yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sehingga dapat diasumsikan bahwa DAU mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengalokasian Belanja Modal. Semakin besar transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka alokasi Belanja Modal akan naik juga. Ketika alokasi Belanja Modal suatu daerah cukup besar, hal tersebut membuat rawan akan adanya perilaku korup dari berbagai pihak. Alokasi Belanja Modal begitu mudah di *markup* karena sering ditujukan untuk pengadaan barang maupun bangunan yang nominalnya jarang bisa ditaksir oleh masyarakat awam. Hubungan antara DAU terhadap Belanja Modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

Ha₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa.

Pengaruh Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Dodik, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2009), luas wilayah daerah memang mempunyai pengaruh yang positif terhadap anggaran Belanja Modal namun jika dianalisis, daerah yang mempunyai wilayah yang cukup luas hal itu justru akan memakan biaya pembangunan yang cukup besar. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah harus menyediakan anggaran yang cukup besar jika ingin daerah tersebut benar-benar maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu semua maka pemerintah harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran yang akan dibawa oleh pemerintah untuk mewujudkan daerah yang sejahtera.

Kaitan antara Luas Wilayah Daerah daerah dengan alokasi Belanja Modal yang kemudian dihubungkan dengan adanya hubungan keagenan hal ini dapat terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil. Hubungan antara Luas Wilayah Daerah terhadap Belanja Modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut.

Ha₄ : Luas Wilayah Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa.

Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 disebutkan bahwa penentuan kapasitas fiskal untuk DAU dipengaruhi oleh PAD dan DBH dengan persamaan matematisnya $DAU = f(PAD, DBH)$, artinya jika PAD dan DBH naik maka DAU turun atau sebaliknya. Dengan demikian desentralisasi PBB dan BPHTB tidak saja berdampak terhadap PAD dan DBH tetapi juga akan berdampak terhadap DAU. Kaitan antara PAD, DBH, dan DAU dengan Belanja Modal yaitu ketiga sumber pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintahan daerah (*agent*) kepada masyarakat (*principal*). Sedangkan Luas Wilayah Daerah merupakan salah satu pertimbangan bagi pemda dalam mengalokasikan Belanja Modal untuk suatu daerah. Hubungan antara PAD, DBH, DAU dan Luas Wilayah Daerah terhadap Belanja Modal dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H_{a5} : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa.

METODE

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di Pulau Jawa pada Tahun 2010. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang di tentukan. Kriteria sampel yang digunakan yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota yang laporan realisasi APBDnya tercantum di laporan realisasi APBD tahun 2010 dan laporan realisasi APBD tahun 2010 dilaporkan secara lengkap. Dari pemilihan sampel tersebut, maka didapatkan 93 Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel Belanja Modal

Belanja Modal termasuk kedalam belanja langsung yang dianggarkan oleh pemerintah untuk menambah aset-aset tetap yang ditujukan untuk kegiatan investasi pemerintah. (Yovita, 2011). Pengukuran variabel Belanja Modal ini diukur dengan skala rasio. Belanja Modal dapat diukur dengan perhitungan :

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari penggalan potensi kekayaan-kekayaan daerah yang berupa pajak daerah, retribusi, laba BUMD, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan :

PAD = Total pajak daerah + total retribusi daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Variabel Dana Bagi Hasil

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk mendukung penerapan desentralisasi. Indikator DBH adalah DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Variabel DBH ini diukur dengan menggunakan skala rasio.

Variabel Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka untuk membantu mengatasi keuangan daerah yang mengalami ketimpangan fiskal karena penyerapan fiskal yang lemah. Variabel DAU ini diukur dengan menggunakan skala rasio.

Variabel Luas Wilayah Daerah

Luas Wilayah Daerah merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah

dalam mengalokasikan Belanja Modal mereka. Semakin Luas Wilayah Daerah maka kebutuhan akan infrastruktur di daerah lebih banyak sehingga diharapkan pengalokasian Belanja Modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Luas Wilayah Daerah daerah diukur dengan melihat berapa Luas Wilayah Daerah daerah tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan

Pemda dan Permendagri mengenai jumlah PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah pada tahun 2010.

Teknik Analisis Data

Teknik merupakan metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan statistic deskriptif. Penggunaan metode tersebut dicocokkan dengan penelitian ini yang melakukan uji pengaruh. Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	93	25099	908648	109801.68	114386.916
DBH	93	23223	733096	110017.06	117010.317
DAU	93	56885	1115704	551614.45	200401.357
LW	93	16	5782	1120.94	987.508
BM	93	25479	1034993	136010.52	128175.850
Valid N(listwise)	93				

Sumber : Output SPSS (dalam jutaan rupiah dan km²)

Jumlah PAD terendah Rp 25 Miliar dan PAD tertinggi Rp 908 Miliar. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai program-program pembangunan yang direalisasikan melalui alokasi Belanja Modal. Jumlah DBH terendah Rp 23 Miliar dan jumlah DBH tertinggi Rp 733 Miliar. DBH merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang ditujukan untuk membantu meningkatkan pembangunan di daerah. DAU merupakan dana yang ditransfer dari Pemerintah pusat kepada daerah dan dana tersebut dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan finansial antar daerah.

Jumlah DAU terendah Rp 56 Miliar dan jumlah DAU tertinggi Rp 1,11 Triliun.

Luas Wilayah Daerah terendah 16 Km² dan Luas Wilayah Daerah tertinggi 5782 Km². Luas Wilayah Daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengalokasian Belanja Modal suatu daerah, karena daerah dengan wilayah yang lebih luas dimana disitu banyak penduduknya maka pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak, maka Belanja Modal yang harus dialokasikan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut harus lebih tinggi. Jumlah Belanja Modal terendah Rp 25 Miliar dan jumlah Belanja Modal tertinggi Rp 1,03 Triliun.

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	15026.326	16551.315		.908	.366
	PAD	.723	.100	.645	7.240	.000
	DBH	.351	.093	.320	3.755	.000
	DAU	-.037	.041	-.057	-.900	.370
	LW	20.700	7.844	.159	2.639	.010

a. Dependent Variable: BM

Tabel 4. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.274E12	4	3.185E11	118.126	.000 ^a
	Residual	2.373E11	88	2.697E9		
	Total	1.511E12	92			

a. Predictors: (Constant), LW, DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber Output SPSS

Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel PAD terhadap Belanja Modal sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi PAD yang diterima oleh suatu daerah maka alokasi Belanja Modal daerah tersebut akan meningkat. Tinggi rendahnya Belanja Modal akan dipengaruhi oleh penerimaan PAD suatu daerah, karena kemampuan Belanja Modal di daerah akan selalu mempertimbangkan sumber penerimaan daerah apakah akan mencukupi alokasi belanja di daerah atau tidak. Daerah dengan potensi PAD yang tinggi dapat memberikan sumbangsih yang besar terhadap Belanja Modal suatu daerah, dengan begitu program-program

pembangunan dari pemerintah akan dapat terlaksana dengan baik karena dukungan finansial yang baik dari hasil PAD tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia (2007) yang menyatakan bahwa PAD memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sebagai sumber penerimaan daerah, PAD menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat signifikan dalam mempengaruhi suksesnya pembangunan di daerah. Pada prinsipnya PAD merupakan pendapatan yang didapatkan dari penggalan potensi-potensi dan sumber-sumber daya di suatu daerah yang pada nantinya akan dikembalikan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Wandira (2013) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa PAD

tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa DBH (Dana Bagi Hasil) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel DBH terhadap Belanja Modal sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah yang mendapatkan transfer DBH yang cukup tinggi akan cenderung memiliki alokasi Belanja Modal yang cukup tinggi pula. Alokasi Belanja Modal akan disesuaikan dengan seberapa besar DBH yang diterima oleh daerah karena dalam melakukan perencanaan pembiayaan daerah harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak terjadi defisit pembiayaan. DBH mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pengalokasian Belanja Modal. Alokasi Belanja Modal yang cukup besar akan membantu percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah, namun hal tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan financial di daerah. Tata cara pembagian hasil dari DBH telah diatur di dalam Undang-Undang dengan porsi dan persentase masing-masing.

DBH merupakan sumber penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan kekayaan daerah baik itu dari pajak maupun sumberdaya alam. DBH yang ditransfer dari pusat ke daerah, akan digunakan untuk membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah karena pada dasarnya apa yang sudah diambil dan dikelola dari daerah akan dikembalikan lagi ke daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Transfer dana perimbangan seperti DBH ini akan sangat membantu bagi peningkatan pelayanan publik, pelayanan publik yang prima harus didukung oleh Belanja Modal yang mumpuni. Belanja Modal itu sendiri didukung oleh berbagai penerimaan-penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah, diantaranya penerimaan dari DBH. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DBH mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel DBH pajak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan DBH dari sumber daya alam tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, tapi secara simultan variabel DBH pajak dan sumber daya alam berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini cenderung sama dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada dasarnya pajak dan hasil sumber daya alam mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menopang Belanja Modal. Pulau Jawa merupakan Pulau yang padat penduduknya, berbagai kegiatan usaha dan Pemerintahan terpusat di Pulau Jawa, dengan demikian pendapatan dari pajak masih mendominasi sumber pendapatan di daerah

Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa DAU (Dana Alokasi Umum) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel DAU terhadap Belanja Modal sebesar 0,370 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya dapat dikarenakan adanya rentang yang sangat jauh nilai DAU antara beberapa daerah, yaitu antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Probolinggo, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan DAU dengan nilai terendah sejumlah Rp 56 Miliar terdapat di Kota Probolinggo dan nilai tertinggi Rp 1,11 Triliun terdapat di Kabupaten Bogor. Selain itu, DAU menjadi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal karena ada indikasi bahwa DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja rutin. Pada bagian latar belakang telah dijelaskan bahwa pada tahun 2010 alokasi belanja Pemerintah masih didominasi oleh Belanja Aparatur meskipun data tersebut mencakup seluruh wilayah Indonesia. Begitu pula dengan realisasi anggaran APBD di Pulau Jawa, Belanja untuk kegiatan Operasional khususnya untuk

Belanja Pegawai masih begitu tinggi dan mendominasi jika dibandingkan dengan Jumlah Belanja Modal. Dana Perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Daerah lebih banyak pada pos Dana Alokasi Umum, namun penggunaan DAU ini lebih banyak digunakan untuk menutup Belanja-belanja Operasional daripada Belanja Modal, sehingga DAU menjadi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) maupun Wandira (2013) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, dalam penelitian ini sampel menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan terjadi karena adanya perbedaan sampel dan tahun penelitian. Sampel penelitian yang dipakai dalam penelitian ini mencakup wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan penelitian dari Wandira (2013), sedangkan jika dibandingkan dengan sampel penelitian dari Darwanto dan Yulia (2007) dimana sampel penelitiannya mengambil wilayah seluruh Indonesia, sampel penelitian kali ini lebih menghususkan pada daerah di Pulau Jawa.

Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Luas Wilayah Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel Luas Wilayah Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 0,010 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, daerah dengan wilayah yang lebih luas, Belanja Modalnya akan cenderung lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan, daerah yang wilayahnya lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak, pembangunan infrastrukturnya harus lebih banyak sehingga Belanja Modal yang dianggarkan harus lebih besar pula.

Daerah yang mempunyai wilayah yang lebih luas penduduknya lebih banyak sehingga untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana serta menunjang berbagai produktivitas masyarakat di daerah tersebut, maka harus disediakan infrastruktur yang memadai yang sebanding dengan banyaknya jumlah penduduk di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kusnandar dan Dodik (2009) yang menyatakan bahwa, Luas Wilayah Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Pengujian Hipotesis Kelima

Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wandira (2013) yang menyatakan bahwa Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Luas Wilayah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal sebesar 83,6% sedangkan 16,4% dipengaruhi variabel-variabel diluar model penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu secara parsial variabel PAD, DBH, Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan semua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel PAD, DBH, DAU, dan Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

ANALISIS BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

22%

★ Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%